

JURNAL

Ekonomi Dan Perencanaan Pembangunan

Volume: 2. NO: 01, JANUARI - JUNI 2009

PENERBIT PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU



ISSN 1979-7338

PROGRAM BANTUAN PINJAMAN LANGSUNG MASYARAKAT DI KABUPATEN KAUR : SEBUAH EVALUASI

Lelkamsi Sitorus, Handoko Hadiyanto, Sunoto

ANALISIS HUBUNGAN PERGERAKAN SUKU BUNGA DAN INFLASI PROPINSI BENGKULU TAHUN 1990 - 2007

Siswanto Kunrohadi, Ketut Sukiyono, Edy Rahmantiyo

ANALISIS APBD PROPINSI BENGKULU TAHUN 2002 – 2006

Puthut Eko Pramono, Hery Sunaryanto, Benardin

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, SIMPANAN MASYARAKAT DAN ANGKATAN KERJA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BENGKULU

Hosein Wahid, M. Ridwan, Edy Rahmantyo

ANALISIS PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DITINJAU DARI PERSEPSI MASYARAKAT KABUPATEN KEPAHANG

Yustina Ery Herawati, Handoko Hadiyanto, Merri Anitasari

POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN PAJAK BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN KEPAHANG

Heru Irwanto, Retno A Ekaputri, Roosemarina A Rambe

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL PROPINSI BENGKULU PERIODE 2001 – 2005

Muhammad Mulyo, M. Ridwan, Hutapia

ANALISIS ANGGARAN DAN AKUNTABILITAS KINERJA STUDI KASUS PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2003 S.D 2008

Ade Tri Aji Kusumah, Ridwan Nurazi,, Yefriza

Program Magister Perencanaan Pembangunan
Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu

JURNAL EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Magister Perencanaan Pembangunan

FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BENGKULU

Gedung S Jln. Raya Kandang Limun Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu

Telp 0736 - 28481 Fax : 0736 - 28481 email : mpp_feunib@yahoo.com

JURNAL
EKONOMI DAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Vol. 2 NO. 01 JANUARI - JUNI 2009

ISSN: 1979-7338

Program Bantuan Pinjaman Langsung Masyarakat Di Kabupaten Kaur : Sebuah Evaluasi

Lelkamsi Sitorus, Handoko Hadiyanto, Sunoto 1-8

Analisis Hubungan Pergerakan Suku Bunga Dan Inflasi Propinsi Bengkulu Tahun 1990 - 2007

Siswanto Kunrohadi, Ketut Sukiyono, Edy Rahmantiyo 9-17

Analisis APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2002 – 2006

Puthut Eko Pramono, Hery Sunaryanto, Benardin 18-25

**Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Simpanan Masyarakat Dan Angkatan Kerja Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Bengkulu**

Hosein Wahid, M. Ridwan, Edy Rahmantiyo..... 26-33

**Analisis Program Upaya Kesehatan Perorangan Ditinjau Dari Persepsi Masyarakat
Kabupaten Kepahiang**

Yustina Ery Herawati, Handoko Hadiyanto, Merri Anitasari 34-41

**Potensi, Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Pajak Bahan Galian Golongan C
Di Kabupaten Kepahiang**

Heru Irwanto, Retno A Ekaputri, Roosemarina A Rambe 42-50

Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Provinsi Bengkulu Periode 2001 – 2005

Muhammad Mulyo, M. Ridwan, Hutapia 51-59

**Analisis Anggaran Dan Akuntabilitas Kinerja Studi Kasus Pemerintah Provinsi Bengkulu
Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2008**

Ade Tri Aji Kusumah, Ridwan Nurazi, Yefriza 60-67

**ANALISIS APBD PROPINSI BENGKULU
TAHUN 2002 – 2006**

**ANALYSIS OF APBD OF BENGKULU PROVINCE
PERIOD 2002-2006**

By:

Puthut Eko Pramono, Hery Sunaryanto, Benardin

ABSTRACT

This research objective is to know the finance ability of the Bengkulu Province, the growth rate of the routine expenditure and acceptance, the development and it's efficiency and the effectively .

Data that used is secondary data which consist of PAD, routine budget, development budget and the total APBD of Bengkulu Province from 2002 till 2006. With measuring DOFD and IKR will be known the level ability of the local finance. The PAD growth, acceptance and the expenditure of the financing can be know by the efficiency, potency effectively.

The result of the research show that DOFD, the mean equal is 25,91% it is show the subsidy of the central government is high that the mean equal is 74,09% with IKR the mean equal is 41,90% its show the local ability finance is still low. In routine expenditure aspect the mean is 61,55% it's show the efficiency criterion. The mean of PAD is 111,79% and APBD mean is 102,75% showing the administration management of financing is good. PAD shall be comprehended as the result of the increasing the growing of the investment in the local, so the effort of the acceleration of the increasing of PAD not sacrifice the long term importance that is private sector investment.

Keywords: PAD, the routine expenditure and development

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk berperan aktif dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan atas pertimbangan bahwa daerah lebih

mengerti dan mengetahui kebutuhan masyarakat di daerahnya. Otonomi daerah membuka peluang, tantangan dan kendala untuk lebih leluasa mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat. Salah satu peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi daerah adalah masalah kesiapan sumber-sumber pembiayaan atau kemampuan daerah menyelenggarakan urusan rumah tangga secara mandiri.

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan system penyelenggaraan pemerintahan Negara (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004).

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Dimana APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi APBD mudah dilakukan yang disepakati antara eksekutif dan legislative dalam bentuk Peraturan Daerah.

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel, untuk itu pemerintah daerah melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembangunan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan keluhan masyarakat yang berkaitan dengan pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas seperti halnya pembangunan yang sekarang sedang digalakkan melalui proyek-proyek multi years ternyata banyak bermasalah dan dipertanyakan masyarakat.

Sampai saat ini berbagai kebijakan telah diambil oleh pemerintah untuk mengembangkan dan meningkatkan kemampuan daerah di bidang keuangan daerah, karena aspek keuangan daerah menjadi sesuatu yang penting, sebab untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah dibutuhkan dana atau biaya yang cukup besar sehingga kepada daerah diberi hak untuk mengatur dan

mengurus rumahtangganya sendiri dalam arti menggali dan mengelola pendapatan asli daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah daerah.

Ketertinggalan Propinsi Bengkulu dengan Propinsi Lain khususnya yang berada di Wilayah Indonesia bagian Barat salah satu aspeknya adalah kecilnya APBD Propinsi Bengkulu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sebagai bahan kajian, APBD Propinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk sekitar 1,8 juta jiwa untuk Tahun Anggaran 2006 ini hanya sebesar Rp 556.308.031.525,43 (Nota Penjelasan Raperda Propinsi Bengkulu Tentang Penetapan Sisa Perhitungan APBD TA.2006).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah memang bukan satu-satunya indikasi keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, akan tetapi lebih pada kesiapan Sumber Daya Manusia, ketepatan sasaran, sarana dan prasarana kelembagaan dan kinerjanya. Pemerataan dan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran perlu adanya kajian dan pertimbangan yang lebih mendalam. Proses yang dilalui pada tahapan penyusunan APBD memang telah dilaksanakan, akan tetapi banyak kebutuhan masyarakat yang tidak tersampaikan pada usulan baik melalui Musrembang untuk menentukan prioritas pembangunan yang berkembang menjadi kebijakan umum anggaran, plafon prioritas anggaran dan dibahas bersama antara eksekutif dan legislatif melalui perjalanan panjang pembahasan oleh Komisi-komisi DPRD, Panitia Anggaran dan terakhir mendapat persetujuan dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD untuk selanjutnya persetujuan bersama dalam bentuk Perda APBD. Berkenaan dengan hal tersebut, timbul pemikiran bagaimanakah kondisi keuangan daerah di Propinsi Bengkulu.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Propinsi Bengkulu?
2. Bagaimana tingkat efektifitas dan efisiensi APBD Propinsi Bengkulu?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tingkat Kemampuan Keuangan Daerah Propinsi Bengkulu.
2. Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi APBD Propinsi Bengkulu.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah, dengan demikian APBD merupakan suatu wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan dimana pada saat tertentu manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat atau dengan kata lain merupakan instrumen kebijakan yang dipakai, yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah

Soni Yuwono (2005:29) menarik kesimpulan sebagai berikut:

Anggaran merupakan titik fokus dari persekutuan antara proses perencanaan dan pengendalian. Penganggaran (budgeting) adalah proses penerjemahan rencana aktivitas kedalam rencana keuangan (budget). Dalam makna yang lebih luas, penganggaran meliputi penyiapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban anggaran yang dikenal dengan siklus anggaran. Dengan demikian penganggaran perlu adanya standardisasi dalam berbagai formulir, dokumen, instruksi dan prosedur karena menyangkut dan terkait dengan operasional perusahaan sehari-hari.

Dalam Undang- Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PPRI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah".

2.1.2 Kemampuan Keuangan Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 disebutkan, Kemampuan Keuangan Daerah merupakan kekuatan yang berasal dari daerah untuk menyelenggarakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Salah satu aspek yang dapat menentukan keberhasilan otonomi daerah adalah kemandirian pemerintah daerah. Dengan demikian implikasi dari pengembangan otonomi daerah bukan semata-mata merupakan penambahan urusan yang diserahkan, akan tetapi juga seberapa besar wewenang yang diserahkan tersebut memberikan kemampuan mengambil prakarsa dalam pengelolaan keuangan daerah termasuk desentralisasi fiskal sehingga daerah dapat mengurangi derajat ketergantungannya kepada pusat dan dapat membiayai kegiatan pembangunan daerahnya.

Pengukuran derajat otonomi fiskal merupakan pengukuran terhadap kemampuan keuangan suatu daerah dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Tolok ukur kemampuan daerah dilihat dari rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap total APBD. Untuk mengukur kemampuan keuangan suatu daerah Sugiyanto (2000 : 2) digunakan analisis kontribusi PAD terhadap APBD (Derajat Otonomi Fiskal Daerah) yaitu nisbah antara PAD pada tahun tertentu dengan APBD pada tahun tertentu.

Selain itu dengan melihat Kemampuan rutin daerah atau kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin daerah yang tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) dengan tolok ukur yang dikemukakan Tumilar (1997:38) yaitu ratio pendapatan Asli Daerah terhadap total belanja rutin daerah.

2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah telah diatur secara tegas dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 yakni pasal 157 huruf a yang menyebutkan bahwa “Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Pendapatan Asli Daerah (PAD) menduduki posisi yang sangat penting dalam setiap penyelenggaraan pemerintah daerah, karena PAD-lah yang secara ideal diharapkan menjadi pilar utama dalam membiayai kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan, sedangkan penerimaan yang bersumber di luar Pendapatan Asli Daerah hanya sebagai pendukung saja. Demikian juga dalam perspektif otonomi daerah, PAD menjadi sumber keuangan yang paling utama di samping penerimaan lainnya yang berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun harus diakui bahwa Pendapatan Asli Daerah belum dapat diandalkan sebagai sumber pembiayaan yang dominan dalam pengeluaran pemerintah daerah lebih khususnya pada belanja rutin daerah.

2.1.4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran

Pengertian Efektivitas menurut Devas yang dikutip Budiman (200:23) “adalah hasil guna kegiatan pemerintah dalam mengurus keuangan daerah harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan program dapat direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pemerintah dengan biaya serendah-rendahnya dan dalam waktu secepat-sepatnya”.

Efektivitas adalah hubungan antara *Input* dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu kegiatan pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi adalah dengan meningkatkan *output* dengan *input* yang sama, atau dengan menaikkan *output* dengan proporsi yang besar dengan kenaikan *output* yang proporsional, atau juga dengan menurunkan *input* dengan proporsi yang besar dan menurunkan *output* secara proporsional

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian penulis menggunakan jenis penelitian eksplanatoris yaitu penelitian yang menggunakan model yang sudah ada/dilakukan, dengan menggunakan data sekunder dengan membaca berbagai buku literatur dan referensi lainnya, termasuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh landasan teori yang dapat mendukung analisis yang dilakukan nantinya.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder *time series* (runtun waktu) yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Bengkulu, Biro Pusat Statistik Propinsi Bengkulu dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Bengkulu.

3.3. Metode Analisis

3.3.1. Kemampuan Keuangan Daerah

Untuk menghitung Kemampuan Keuangan Daerah adalah dengan menghitung Derajat Otonomi Fiskal Daerah dan Indeks Kemampuan Rutin Daerah. Rumus yang digunakan adalah Rumus yang dikemukakan Richard Tumilar (1997:38) satuan persen (%), sebagai berikut:

a. Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)

$$DOFD_t = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\%$$

dimana :

$DOFD_t$ = Derajat Otonomi Fiskal Daerah tahun ke-t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ke-t.

$APBD_t$ = Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun ke-t.

Indeks Kemampuan Rutin (IKR)

$$IKR_t = \frac{PAD_t}{\text{Pengeluaran Rutin}_t} \times 100 \%$$

dimana

IKR_t = Indeks Kemampuan Rutin tahun ke-t

PAD_t = Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun ke-t.

$\text{Pengeluaran Rutin}_t$ = Realisasi Pengeluaran Anggaran Rutin tahun ke-t

3.3.2. Tingkat Efisiensi dan Efektivitas Keuangan Daerah

a. Tingkat Efisiensi Pengeluaran Pemerintah

Untuk menganalisis tingkat efisiensi formula hitungannya adalah rasio penerimaan dengan pengeluaran rutin, di mana semakin kecil rasionya maka semakin efisien pengelolaan keuangan tersebut dengan satuan % (persen);

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{pengeluaran rutin} \times 100\%}{\text{Penerimaan Daerah}}$$

b. Tingkat Efektivitas Pendapatan

Dalam menganalisis tingkat efektivitas maka formula hitungannya adalah rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan. Di mana semakin besar rasio yang didapat semakin efektif dengan menghitung perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan dengan satuan % (persen).

$$\text{Efektivitas} = \frac{(\text{Realisasi Penerimaan} / \text{Target}) \times 100 \%$$

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan PAD lebih stabil dibandingkan dengan pertumbuhan APBD, pertumbuhan PAD rata-rata sebesar 40,30% lebih tinggi dari rata-rata APBD sebesar 24,81%. Hal yang

menggembirakan adalah terjadinya kecenderungan kenaikan perolehan PAD yang berdampak pula pada peningkatan APBD pada setiap tahun anggaran meskipun perannya masih relatif kecil. Kalau dilihat dari peran PAD dalam menyumbang besaran APBD, maka besaran PAD tahun 2002 sebesar 19% dari APBD, PAD tahun 2002 sebesar 19% lebih dari APBD, PAD tahun 2003 sebesar 29% lebih dari APBD, PAD tahun 2004 sebesar 31% lebih dari APBD dan PAD tahun 2006 sebesar 29% lebih dari APBD.

Tabel 4.1. Tingkat Pertumbuhan PAD dan APBD Prop Bengkulu 2002– 2006

	Pertumbuhan PAD (%)	Pertumbuhan APBD (%)
2002	46,26	22,37
2003	51,64	47,88
2004	52,03	0,62
2005	16,44	10,99
2006	35,15	42,16
Rata-rata	40,30	24,81

Sumber : BPS Propinsi Bengkulu

Untuk mengejar target Penerimaan Asli Daerah sebagai sumber Kemampuan Keuangan Daerah, Pemerintah Propinsi Bengkulu harus bekerja ekstra kuat mengingat upaya peningkatan sumber-sumber penerimaan daerah dalam setiap tahunnya mulai dari Tahun Anggaran 2002 sampai dengan 2006 rata-rata sebesar 40,30%. Sektor Pajak Daerah masih mendominasi perolehan pemasukan PAD diikuti oleh Retribusi Daerah. Kedua sektor ini masih menggali penarikan dana sebagian besar dari masyarakat (lihat Lampiran 1: Realisasi Perkembangan Nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu, Tahun 2002 – 2006). Perolehan laba dari hasil kekayaan daerah melalui Perusahaan Daerah dan pihak ketiga (investor) sebetulnya merupakan peluang Pemerintah Daerah untuk dapat memperbesar perolehan PAD. Perolehan laba BUMD sampai tahun 2006 belum bisa diandalkan, mengingat Penyertaan Modal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sampai

dengan tahun 2006 sebesar Rp.100.500.000.000,- (berdasarkan

laporan hasil Audit BPK-RI tahun 2006 ditambah penyertaan modal program Multiyears tahun 2006) baru menghasilkan laba sebesar 4%. Seharusnya dengan pengelolaan manajemen BUMD yang baik maka perolehan laba bisa diandalkan untuk meningkatkan perolehan PAD dan dapat dijadikan unggulan setelah Perolehan Pajak dan Retribusi daerah.

Dari analisa DOFD dari tahun 2002 sampai dengan 2006 dengan berlakunya Otonomi Daerah secara rata-rata Derajat Otonomi Fiskal Daerah Propinsi Bengkulu masuk dalam kategori "Sedang" dengan prosentase DOFD sebesar 25,91%. Hal ini dapat dilihat DOFD terendah terjadi pada tahun 2002 dan 2003 yang masing-masing hanya mencapai 19,21% dan 19,70% masuk kriteria kurang, artinya Kemampuan Keuangan Daerah sangat tergantung Pemerintah Pusat (80% lebih).

Dari hasil penelitian dan pengolahan data setelah Pemerintah menerapkan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diberlakukan dapat dilihat bahwa DOFD Propinsi Bengkulu 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2002 s.d 2006 relatif masih sangat kecil dengan ditunjukkan angka prosentase antara 19,21% sampai dengan 31,23%. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.8 di bawah ini yang berisi Derajat Otonomi Fiskal Daerah Propinsi Bengkulu dan Dukungan Pemerintah Pusat tahun 2002 – 2006.

Tabel 4.2. DOFD Propinsi Bengkulu 2002 – 2006 dan Dukungan Pemerintah Pusat

Sumber : hasil penelitian

DOFD tertinggi terjadi pada tahun 2005 mencapai 31,22 % dengan kriteria "cukup". Dengan demikian maka dukungan Pemerintah Pusat pada Keuangan Propinsi Bengkulu masih sangat dominan rata-rata setiap tahunnya mencapai 74,09% artinya pembiayaan Pemerintah Daerah untuk mengelola Propinsi Bengkulu 74,09% masih tergantung pada sumber keuangan diluar Pendapatan Asli Daerah (bantuan keuangan

Pemerintah Pusat). Derajat Otonomi Fiskal Daerah terendah terjadi pada tahun 2002, ini menunjukkan bahwa daya dukung pendapatan asli daerah Propinsi Bengkulu masih sangat lemah mengiringi pelaksanaan otonomi daerah di tahun ke dua. Dengan melihat kenyataan ini Propinsi Bengkulu untuk membiayai keseluruhan kegiatan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan masih sangat tergantung pada aliran dana dari pemerintah pusat.

Kemampuan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah yang tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Propinsi Bengkulu, diasumsikan apabila anggaran APBD Propinsi Bengkulu hanya dibiayai oleh PAD dan hanya mampu untuk membiayai kegiatan rutinnya saja maka tingkat PAD untuk membiayai anggaran Rutin dari tahun 2002 didapatkan angka IKR dengan kriteria "Kurang", kelihatan dari tahun ke tahun semakin meningkat bahkan pada tahun 2006 sudah mendekati 50% dan rata-rata IKR menunjukkan kriteria "Cukup". Pertumbuhan antara Penerimaan Anggaran Pembangunan dan Pengeluaran Anggaran Pembangunan rata-rata selama kurun waktu 5 tahun juga terlihat hampir seimbang, Pertumbuhan Penerimaan Anggaran Pembangunan rata-rata 58,77% sedangkan Pertumbuhan Pengeluaran Anggaran Pembangunan sebesar 60,54% dengan peningkatan setiap tahunnya sangat bervariasi bahkan terjadi penurunan. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi Propinsi Bengkulu yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Tingkat efisiensi Belanja Rutin Sangat efisien terjadi dua tahun berturut-turut pada

Tahun	DOFD (%)	Kriteria	Dukungan Pemerintah Pusat (%)
2002	19,21	Kurang	80,79
2003	19,70	Kurang	80,30
2004	29,76	Sedang	70,24
2005	31,22	Cukup	68,78
2006	29,68	Sedang	70,32
Rata-rata	25,91	Sedang	74,09

tahun 2002 dan 2003 dan pada data terakhir tahun 2006 akan tetapi secara keseluruhan

masih termasuk dalam kriteria Efisien. Besarnya Anggaran Belanja Rutin pada APBD Propinsi Bengkulu pada setiap tahun anggaran, disebabkan karena pada pos ini memang anggaran terbesar digunakan untuk membiayai seluruh pegawai dan biaya operasional Pemerintah Propinsi dan jajaran Pemerintah Propinsi Bengkulu.

Apabila kita asumsikan penghitungan efisiensi menggunakan rumus seperti anggaran Rutin maka anggaran Pembangunan, ternyata dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 rata-rata Sangat efisien dengan tingkat efisiensi 30,35%. Interval tingkat efisiensi berkisar antara 21,75% (Sangat Efisien) sampai sebesar 46,20% yang terjadi pada tahun 2006.

Realisasi pencapaian APBD maupun PAD dari target mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 rata-rata sangat tinggi, di atas 100% bahkan pada tahun 2002 dan 2003 realisasi PAD diatas 120%. Dilihat dari capaian target dan realisasi baik PAD dan APBD pada tiga tahun pertama ada kecenderungan target yang ditetapkan dalam setiap tahunnya terlalu rendah sehingga pada waktu capaian realisasinya selalu melampaui target. Meskipun demikian tingkat efektifitas APBD masih lebih stabil dibanding dengan PAD

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Derajat Otonomi Fiskal Daerah Propinsi Bengkulu mulai dari tahun 2002 sampai dengan 2006 rata-rata relatif rendah hanya berkisar 25,91% ini artinya bahwa dukungan keuangan dari Pemerintah Pusat masih sangat tinggi yaitu sebesar 74,09%.
2. Kemampuan dalam membiayai pengeluaran rutin daerah yang tercermin dalam Indeks Kemampuan Rutin (IKR) Propinsi Bengkulu dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 perkembangannya bagus dari tahun ke tahun selalu meningkat dan terakhir mendekati 50% sedangkan rata-rata IKR

menunjukkan angka 41,90% kriteria “Cukup” artinya belum mencapai setengah anggaran rutin yang bisa dibiayai menggunakan seluruh PAD yang didapatkan.

3. Tingkat efisiensi Anggaran Rutin rata-rata dengan kriteria Efisien, dengan tingkat efisiensi sebesar 61,55%
4. PAD Propinsi Bengkulu dengan perbandingan antara target dan realisasi rata-rata sebesar 111,79% menunjukkan tingkat sangat efektif, demikian pula dengan target dan realisasi APBD rata-rata 102,75% menunjukkan bahwa administrasi pengelolaan APBD Propinsi Bengkulu sangat efektif.

5.2. Saran

Untuk lebih sempurnanya hasil penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penggunaan rentang waktu yang semakin lama dengan variable yang lebih rinci akan semakin memperlihatkan gambaran kondisi keuangan daerah sehingga akan didapatkan gambaran prioritas pembangunan dan sumber pendapatan yang dapat digali dan ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiman, 2002, “*Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan*” Tesis, Program Studi Magister Ekonomika Pembangunan, Universitas Gajah Mada
- Depdagri, 1994, Kepmendagri No. 690.900.327, “*Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*”
- Mardiasmo, 1999, “*Otonomi Daerah Yang Berorientasi Pada Kepentingan Publik National Seminar Promoting Good Governance 1999*”
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang “*Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*”
- Pemerintah Propinsi Bengkulu, 2005, “*Rencana Pembangunan Jangka Menengah*”

Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2010"

Sony Yuwono, Yengku Agus Indrajaya, Hariyandi, 2005, *"Penganggaran Sektor Publik"*, Bayu Media Publishing, Malang Jawa Timur

Tumilar, Richard L.H., 1997 *"Otonomi Keuangan dan Ekonomi Daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Utara"*, Tesis S-2, PPS – UGM, Yogyakarta

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang *"Pemerintahan Daerah"*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang *"Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah"*